

**PERJANJIAN KINERJA**

**TAHUN 2024**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**KABUPATEN LUWU TIMUR**



**PERJANJIAN KINERJA**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HALSEN, S.IP, MM

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs.H.BUDIMAN, M.Pd

Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

 Malili, 4 Januari 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

BUPATI LUWU TIMUR KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



**Drs. H. BUDIMAN, M.Pd.** **HALSEN, S.IP, MM**

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**TABEL KINERJA**

**TAHUN 2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Target** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(5)* |
| 1. | Meningkatnya kualitas pembangunan desa | Persentase meningkatnya desa mandiri |  20,08% |
| 2. | Meningkatnya Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat Desa | Indeks Ketahanan Sosial (IKS)  | 0.73 |
| Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)  | 0.72 |
| Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)  | 0.73 |
| 3. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Nilai SAKIP  | 71,25 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Program** |  | **Anggaran** | **Keterangan** |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp |  4.616.968.611,00  | APBD |
| 2. | Program Penataan Desa | Rp | 42.717.446,00 | APBD |
| 3. | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Rp | 714.307.684,00 | APBD |
| 4. | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Rp | 1.087.308.470,00 | APBD |

 Malili, 4 Januari 2024

 BUPATI LUWU TIMUR KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN

 MASYARAKAT DAN DESA



 **(Drs. H. BUDIMAN, M.Pd)** (**HALSEN, S.IP,MM)**

**Lampiran 2 Perjanjian Kinerja**

**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

**Penjelasan Kinerja**

**Tahun 2024**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah perkembangan atau peningkatan kualitas pembangunan pada 125 desa di Kabupaten Luwu Timur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, Pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Peningkatan kualitas Pembangunan desa juga meningkatkan kemandirian desa sebagai pencapaian positif sebagai Upaya meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan Masyarakat desa. Dasar hukum dalam mencapai kinerja ini antara lain :

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor …. Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026.
3. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Persentase meningkatnya desa mandiri

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Relevansi Menggambarkan Kondisi** | **Formulasi** | **Sumber data** |
| 1 | Persentase meningkatnya desa mandiri | Kualitas pembangunan desa dipengaruhi oleh perkembangan status desa mandiri. Desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksebilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus serta pelayanan pemerintahan yang sudah sangat baik | (Jumlah Status Desa mandiri/Jumlah seluruh Desa x 100 %) | * Laporan Data Bidang Penataan Desa
* Laporan Data Bidang Pengembangan SDM dan SDA
* Laporan Data Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
 |

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapain dengan penjelasan sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indikator Kinerja | Target | Penjelasan |
| Persentase meningkatnya desa mandiri | 20.08%  | Persentase meningkatnya desa mandiri di tahun 2024 ditetapkan target 20.08% atau 24 desa mandiri dari 125 desa di Kabupaten Luwu Timur dan dalam pelaksanaannya diharapkan dapat tercapai 100%.Terjadi perbedaan target antara Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dengan target Perjanjian Kinerja tahun 2024. Pada Rentsra DPMD Kabupaten Luwu Timur yaitu 10.48% atau 13 desa mandiri, dikarenakan pada tahun 2023 mengalami peningkatan melebihi target sebesar 19.20% atau 24 desa mengalami peningkatan status mandiri , sehingga untuk target indikator kinerja tahun 2024 mengikuti capaian realisasi. Penetapan target kinerja persentase desa mandiri setiap tahun, direncanakan 2 desa mengalami peningkatan status. |

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat Desa yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah perkembangan atau peningkatan 3 (tiga) pilar utama yaitu pengukuran kesejahteraan masyarakat desa dan Pembangunan desa (indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan lingkungan). Peningkatan Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat Desa dapat diartikan laju pertumbuhan Indeks Desa Membangun Kabupaten Luwu Timur menunjukkan peningkatan yang signifikan yang setiap tahun terjadi disebabkan karena indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan lingkungan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.
2. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
3. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
4. Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2022 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Tahun 2022.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
6. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 3 (tiga) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

Penjelasan Indikator Kinerja 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Relevansi**  | **Formulasi** | **Sumber data** |
| 1 | Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa | Meningkatnya Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat Desa dipengaruhi oleh Indeks Ketahanan Sosial (IKS). Indikator IKS dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa Maju dan Mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek IKS menjadi kekuatan saling mengisi, menjaga potensi dan kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Misalnya yang memiliki ketersediaan sarana kesehatan, Ketersediaan layanan tenaga kesehatan bidan, ketersediaan layanan tenaga kesehatan dokter, Akses ke Poskesdes/Polindes dan Posyandu, Tingkat kepersertaan BPJS/JKN/KIS, Akses Pendidikan, Kesejahteraan sosial, fasilitasi permukiman.  | Σ Nilai IKS seluruh Desa Jumlah Desa | * Bidang Kelembagaan Desa & Pemberdayaan Masyarakat
* Bidang Penataan Desa
 |

Target Kinerja 1

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapain dengan penjelasan sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indikator Kinerja | Target | Penjelasan |
| Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa | 0.73  | Indeks ketahanan sosial Masyarakat desa di tahun 2024 ditetapkan target 0.73 poin dan diharapkan dalam pelaksanaannya dapat tercapai 100% sesuai target.Sedangkan pada tahun sebelumnya ditetapkan target IKS di tahun 2023 yaitu 0.71 poin.  |

Penjelasan Indikator Kinerja 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Relevansi**  | **Formulasi** | **Sumber data** |
| 1. | Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa | Meningkatnya Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat Desa dipengaruhi oleh Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE). Indikator IKE dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa Maju dan Mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek IKE menjadi kekuatan saling mengisi, menjaga potensi dan kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Misalnya Keragaman produksi (jumlah industri mikro), Ketersediaan Pasar, Lembaga ekonomi, ketersediaan moda transportasi umum, kualitas jalan, keterbukaan wilayah.  | Σ Nilai IKE seluruh Desa Jumlah Desa | * Bidang Pengembangan SDM & SDA Desa
* Bidang Penataan Desa
 |

Target Kinerja 2

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapain dengan penjelasan sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indikator Kinerja | Target | Penjelasan |
| Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa | 0.72  | Indeks ketahanan sosial Masyarakat desa di tahun 2024 ditetapkan target 0.72 poin dan diharapkan dalam pelaksanaannya dapat tercapai 100% sesuai target.Sedangkan pada tahun sebelumnya ditetapkan target IKE di tahun 2023 yaitu 0.70 poin.  |

Penjelasan Indikator Kinerja 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Relevansi Menggambarkan Kondisi** | **Formulasi** | **Sumber data** |
| 1. | Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa | Meningkatnya Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat Desa dipengaruhi oleh Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Indikator IKL dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa Maju dan Mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek IKL menjadi kekuatan saling mengisi, menjaga potensi dan kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Misalnya Kualitas Lingkungan tidak tercemar di Desa (air, udara, tanah, limbah disungai), Rawan Bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan), Tanggap Bencana/Fasilitasi mitigasi (peringatan dini bencana alam, peringatan dini stunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) | Σ Nilai IKL seluruh Desa Jumlah Desa | * Data Desa
 |

Target Kinerja 3

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapain dengan penjelasan sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indikator Kinerja | Target | Penjelasan |
| Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa | 0.72  | Indeks ketahanan lingkungan Masyarakat desa di tahun 2024 ditetapkan target 0.73 poin dan diharapkan dalam pelaksanaannya dapat tercapai 100% sesuai target.Sedangkan pada tahun sebelumnya ditetapkan target IKL di tahun 2023 yaitu 0.71 poin.  |

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terdapat kesadaran dan Upaya untuk meningkatkan tingkat akuntabilitas dalam pencapaian hasil kerja dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Hal ini dapat mencakup peningkatan transparansi, pelaporan, dan evaluasi kinerja untuk memastikan bahwa pelayanan dan program yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dipertanggunjawabkan secara efektif kepada Masyarakat dan pihak yang berkepentingan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan di tahun 2024.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.
5. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Relevansi**  | **Formulasi** | **Sumber data** |
| 1 | Nilai SAKIP | Data perencanaan yang terintegrasi dengan penganggaran pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Keuangan  | Nilai SAKIP | * Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur
 |

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapain dengan penjelasan sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indikator Kinerja | Target | Penjelasan |
| Nilai SAKIP | 73.35  | Nilai SAKIP yang ditetapkan di tahun 2024 dengan nilai absolut antara 70-80 dengan interpretasi SANGAT BAIK, dan diharapkan dalam pelaksanaannya dapat tercapai sesuai target. Sedangkan pada tahun sebelumnya ditetapkan target Nilai SAKIP dengan nilai absolut 70-80 yaitu 70.35 dengan interpretasi SANGAT BAIK.Terjadi perbedaan target antara Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dengan target Perjanjian Kinerja tahun 2024. Hal ini dikarenakan realisasi tahun 2022 73.35 sehingga melebihi taget pada tahun 2024 yaitu 71.00%, sehingga untuk target indikator kinerja tahun 2024 mengikuti capaian realisasi. |



**PERJANJIAN KINERJA**

**SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UMAR HASAN DALLE, S.STP, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HALSEN, S.IP, MM

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

 Malili, 4 Januari 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA DINAS SEKRETARIS DINAS PMD

**HALSEN, S.IP, MM** **UMAR HASAN DALLE, S.STP, M.Si**

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA**

**SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**TABEL KINERJA**

**TAHUN 2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sasaran Program** | **Indikator Kinerja** | **Target** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* |
| 1. | Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran  | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar |  100%  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Program**  |  | **Anggaran** | **Keterangan** |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp | 4.616.968.611,00 | APBD |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kegiatan** |  |  |  |
| 1). | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp | 89.935.360,00 | APBD |
| Sub Kegiatan |  |  |  |
| 1. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Rp | 42.299.735,00 | APBD |
| 2. | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | Rp | 3.522.650,00 | APBD |
| 3. | Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD | Rp | 3.654.000,00 | APBD |
| 4. | Evaluasi Kinerja Peragkat Daerah | Rp | 40.458.975,00 | APBD |
| Kegiatan |
| 2). | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp | 2.668.883.589,00 | APBD |
| Sub Kegiatan |  |  |  |
| 1. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp | 2.610.046.589,00 | APBD |
| 2. | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD | Rp | 58.837.000,00 | APBD |
| Kegiatan |
| 3). | Administarsi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Rp | 16.182.800,00 | APBD |
| Sub kegiatan |
| 1. | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Rp | 16.182.800,00 | APBD |
| Kegiatan |
| 4). | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rp | 86.781950,00 | APBD |
| Sub Kegiatan |
| 1. | Pendataan dan Pengolahan Administarsi Kepegawaian | Rp | 14.999.950,00 | APBD |
| 2. | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Rp | 12.550.000,00 | APBD |
| 3. | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Rp | 59.232.000,00 | APBD |
| Kegiatan |  |  |
| 5). | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp | 694.685.300,00 | APBD |
| Sub Kegiatan |
| 1. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor |  | 2.535.800,00 | APBD |
| 2. | Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor |  | 2.100.000,00 | APBD |
| 3. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |  | 10.411.600,00 | APBD |
| 4. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  | 7.015.000,00 | APBD |
| 5. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |  | 12.780.000,00 | APBD |
| 6. | Fasilitasi Kunjungan Tamu |  | 24.840.000,00 | APBD |
| 7. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  | 340.978.600,00 | APBD |
| Kegiatan |
| 6). | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp | 1.031.535.912,00 | APBD |
| Sub Kegiatan |
| 1. | Pengadaan Mebel |  | 71.810.912,00 | APBD |
| 2. | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  | 10.000.000,00 | APBD |
| 3. | Pengadaan Bangunan/Gedung Kantor Lainnya |  | 949.725.000,00 | APBD |
| Kegiatan |
| 7). | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp | 162.078.000,00 | APBD |
| Sub Kegiatan |
| 1. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Rp | 4.854.000,00 | APBD |
| 2. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp | 94.224.000,00 | APBD |
| 3. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp | 63.000.000,00 | APBD |
| Kegiatan |
| 8). | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp | 160.910.000,00 | APBD |
| 1. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | Rp | 84.650.000,00 | APBD |
| 2. | Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya | Rp | 25.260.000,00 | APBD |
| 3. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya | Rp | 51.000.000,00 | APBD |

 Malili, 4 Januari 2024

KEPALA DINAS PMD SEKRETARIS DINAS PMD,

**HALSEN, S.IP, MM**  **UMAR HASAN DALLE, S.STP, M.Si**

**Lampiran 2 Perjanjian Kinerja**

**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

**Penjelasan Kinerja**

**Tahun 2024**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran, yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan 1 (satu) tahun anggaran pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menunjukkan keteraturan dan keselarasan antara apa yang telah direncanakan sebelumnya dengan apa yang terjadi selama pelaksanaan pelayanan dalam bentuk aktivitas perencanaan, mengoorgansir, mengarahkan, menyelenggarakan dan mengawasi berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan ruang lingkup perkantoran serta tata usaha yang tertib dan baik. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026
3. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Relevansi**  | **Formulasi** | **Sumber data** |
| 1 | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | Dokumen Perencanaan (Renja, RKA, DPA, LAKIP, LKPJ), Laporan Keuangan dan aset, Dokumen Umum & Kepegawaian (Srikandi, Anjab, SKJ, Simpeg, Sipatuh, Si Yanti)   | (Jumlah capaian penunjang urusan perangkat daerah dibagi jumlah seluruh penunjang urusan perangkat daerah) dikali 100% | * Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur
 |

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indikator Kinerja | Target | Penjelasan |
| Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100%  | Target capaian pada tahun 2024 ditetapkan 100% atau terselesaikannya Dokumen Perencanaan (Renja, RKA, DPA, LAKIP, LKPJ), Laporan Keuangan dan aset, Dokumen Umum & Kepegawaian (Srikandi, Anjab, SKJ, Simpeg, Sipatuh, Si Yanti).Sedangkan target capaian pada tahun sebelumnya juga ditetapkan target capaian 100% atau terselesaikannya Dokumen Perencanaan (Renja, RKA, DPA, LAKIP, LKPJ), Laporan Keuangan dan aset, Dokumen Umum & Kepegawaian (Srikandi, Anjab, SKJ, Simpeg, Sipatuh, Si Yanti)  |



**PERJANJIAN KINERJA**

**BIDANG KELEMBAGAAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUZAKKIR, S.Ag

Jabatan : KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HALSEN, S.IP, MM

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

 Malili, 4 Januari 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PMD, KABID. KELEMBAGAAN DESA &

 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

**HALSEN, S.IP,MM** **MUZAKKIR, S.Ag**

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA**

**KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**TABEL KINERJA**

**TAHUN 2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sasaran Program/Kegiatan** | **Indikator Program/Kegiatan** | **Target** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* |
| Sasaran Program |
| 1. | Meningkatnya Lembaga Pemerintahan dan Kemasyarakatan Desa  | Persentase kemasyarakatan desa yang dibina  | 100 % |
| Sasaran Kegiatan |
| 1.a | Tersedianya Data Posyandu  | Persentase posyandu | 100% |
| 1.b | Tersedianya Data PKK aktif | Persentase PKK aktif | 100% |
| 1.c | Tersedianya Data Badan Permusyawaratan Desa | Persentase Badan Permusyawaratan Desa | 100% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan** |  | **Anggaran** | **Keterangan** |
| 1. |  | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Rp |  138.710.280,00 | APBD |
| 1. |  | Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Rp |  138.710.280,00 | APBD |
|  | 1. | Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Rp | 138.710.2800,00 | APBD |
| 2. |  | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Rp |  858.678.570,00 | APBD |
| 1. |  | Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Rp |  858.678.570,00 | APBD |
|  | 1. | Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Rp |  171.360.750,00 | APBD |
|  | 2. | Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKKdalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Rp |  687.317.820,00 | APBD |

 Malili, 4 Januari 2023

 Pihak Kedua, Pihak Pertama,

 KEPALA DINAS PMD, KABID. KELEMBAGAAN DESA &

 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

 **HALSEN, S.IP, MM** **MUZAKKIR, S.Ag**

**Lampiran 2 Perjanjian Kinerja**

**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

**Penjelasan Kinerja**

**Tahun 2024**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Lembaga Pemerintahan dan Kemasyarakatan Desa

Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah mencerminkan pelaksanaan upaya yang ditujukan untuk memberikan dukungan dan memperkuat peran lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan. Pemberdayaan ini melibatkan kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian lembaga dan masyarakat setempat. Dengan mendorong pemberdayaan partisipasi aktif lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat, Pemerintah Daerah dapat menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, mempertahankan keberagaman budaya dan memperkuat fondasi partisipatif dalam pembangunan daerah. Pemberdayaan ini juga mencerminkan pendekatan yang menghargai dan memanfaatkan potensi lokal untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.
4. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Relevansi**  | **Formulasi** | **Sumber data** |
| 1 | Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang dibina | Peningkatan partisipasi Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga adat desa terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat   | (Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina dibagi jumlah keseluruhan lembaga kemasyarakatan desa ) dikali 100% | * Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur
 |

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indikator Kinerja | Target | Penjelasan |
| Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang dibina | 100%  | Target capaian pada tahun 2024 persentase lembaga kemasyarakatan desa ditetapkan target sebesar 100% atau 6 lembaga diantaranya Posyandu, Karang Taruna, RT, RW, PKK dan BPD.  |



**PERJANJIAN KINERJA**

**BIDANG PENATAAN DESA**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LUKMAN, SE, MM

Jabatan : KEPALA BIDANG PENATAAN DESA

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HALSEN, S.IP, MM

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

 Malili, 4 Januari 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PMD KABID. PENATAAN DESA

**HALSEN, S.IP, MM** **LUKMAN, SE, MM**

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA**

**KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**TABEL KINERJA**

**TAHUN 2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **No.** | **Sasaran**  | **Indikator**  | **Target** |
| *(1)* |  | *(2)* | *(3)* | *(4)* |
| Sasaran Program |
| 1. |  |  | Terlaksananya Fasilitasi Usulan Pemekaran Desa  | Persentase desa yang di fasilitasi untuk pemekaran desa  | 50 % |
| Sasaran Kegiatan |
|  |  |  | Terlaksananya Fasilitasi Usulan Pemekaran Desa |  |  |
| 2. |  |  | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. | Persentase Desa yang tertib administrasi dan tata kelola keuangan desa. | 90% |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan** |  | **Anggaran** | **Keterangan** |
| 1. |  |  | Program Penataan Desa | Rp |  42.717.446,00 | APBD |
|  | 1. |  | Penyelenggaraan Penataan Desa | Rp |  42.717.446,00 | APBD |
|  |  | 1. | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa | Rp |  42.717.446,00 | APBD |
| 2. |  |  | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Rp | 404.967.454,00 | APBD |
|  | 1. |  | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Rp | 404.967.454,00 | APBD |
|  |  | 1. | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Rp |  10.654.300,00 | APBD |
|  |  | 2. | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | Rp |  99.024.272,00 | APBD |
|  |  | 3. | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Rp |  34.267.536,00 | APBD |
|  |  | 4. | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Rp |  68.205429,00 | APBD |
|  |  | 5. | Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | Rp |  23.735.193,00 | APBD |
|  |  | 6. | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Rp |  44.080.936,00 | APBD |
|  |  | 7. | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Rp |  124.999.788,00 | APBD |

 Malili, 4 Januari 2024

 Pihak Kedua, Pihak Pertama,

 KEPALA DINAS PMD KABID. PENATAAN DESA

 **HALSEN, S.IP,MM** **LUKMAN, SE, MM**



**PERJANJIAN KINERJA**

**BIDANG PENGEMBANGAN SDM DAN SDA**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I WAYAN SUDINO, SE.MM

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SDM DAN SDA

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HALSEN, S.IP, MM

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

 Malili, 4 Januari 2024

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PMD KABID. PENGEMBANGAN SDM

 DAN SDA

**HALSEN, S.IP, MM** **I WAYAN SUDINO, SE, MM**

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA**

**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SDM DAN SDA**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**TABEL KINERJA**

**TAHUN 2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sasaran**  | **Indikator Program/Kegiatan** | **Target** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* |
| 1 |  |  | Meningkatnya kapasitas aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa | Persentasi aparat desa yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa | 100 % |
| 2. |  |  | Terbentuknya Lembaga ekonomi perdesaan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan | Persentase Lembaga ekonomi perdesaan yang dibentuk dan di kembangkan | 60 % |
| 3. |  |  | Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Desa dari Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna bagi Pemerintah Desa | Persentase Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 60% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan** |  | **Anggaran** | **Keterangan** |
| 1. |  |  | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Rp | 170.629.950,00 | APBD-P |
|  | 1. |  | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Rp | 170.629.950,00 | APBD-P |
|  |  | 1. | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Rp | 170.629.950,00 | APBD-P |
| 2. |  |  | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Rp | 228.629.900,00 | APBD |
|  | 1. |  | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Rp | 228.629.900,00 | APBD |
|  |  | 1. | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (BUMDes/BUMDESA, P2MP) | Rp | 113.380.900,00 | APBD |
|  |  | 2. | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Rp | 115.249.000,00 | APBD |

 Malili, 4 Januari 2024

 Pihak Kedua, Pihak Pertama,

 KEPALA DINAS PMD, KABID. PENGEMBANGAN SDM DAN SDA

 **HALSEN, S.IP, MM** **I WAYAN SUDINO, SE. MM**



**PERJANJIAN KINERJA**

**TINGKAT ESELON IV TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FITRIANI ISMAIL, SH

Jabatan : KASUBAG. PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : UMAR HASAN DALLE, S.STP, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

selaku atasan Pihak Pertama. selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

 Malili, 4 Januari 2024

Pihak Kedua. Pihak Pertama.

SEKRETARIS DINAS PMD KASUBAG. PERENCANAAN &

 KEPEGAWAIAN

**UMAR HASAN DALLE, S.STP, M.Si** **FITRIANI ISMAIL, SH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sasaran**  | **Indikator Kinerja** | **Target** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* |
| Sasaran Program |
| 1. | Terlaksananya program dan kegiatan sesuai dokumen perencanaan  | Persentase program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai perencanaan |  100%  |
| Sasaran Kegiatan |
| 1.a | Tersedianya dokumen perencanaan sesuai ketentuan | Jumlah dokumen perencanaan sesuai ketentuan | 3 Dokumen |
| 1.b | Terlaksananya monitoring program dan kegiatan | Jumlah kegiatan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan | 4 Kegiatan |
| Sasaran Program |
| 2. | Meningkatnya evaluasi internal kinerja pegawai | Persentase kinerja pegawai yang sesuai target | 100% |
| Sasaran Kegiatan |
| 2.a | Terlaksananya monitoring capaian kinerja pegawai dan organisasi setiap triwulan | Jumlah kegiatan monitoring capaian kinerja pegawai dan organisasi | 4 Kegiatan |
| 2.b | Meningkatnya tindak lanjut hasil monitoring | Persentase kinerja pegawai yang ditindaklanjuti | 100% |
| Sasaran Program |
| 3 | Meningkatnya kualitas laporan kinerja | Jumlah laporan kinerja sesuai yang terukur | 1 Laporan |
| Sasaran Kegiatan |
| 3.a | Terverifikasinya laporan kinerja pegawai oleh bagian organisasi | Jumlah dokumen yang di verifikasi | 6 Dokumen |
| 3.b | Tersedianya laporan kinerja pegawai sesuai ketentuan | Jumlah laporan kinerja sesuai ketentuan | 1 Laporan |

**PERJANJIAN KINERJA**

**TINGKAT ESELON IV TAHUN 2024**

SUBAG : PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN

 TAHUN ANGGARAN : 2024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sasaran**  | **Indikator Sub Kegiatan**  | **Target** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* |
| 1 | Meningkatnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja kinerja Perangkat Daerah | 1. Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu;
2. Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu;
3. Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu;
4. JUmlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu.
 | 1. 3 dokumen
2. 2 dokumen
3. 2 dokumen
4. 10 dokumen
 |
| 2 | Meningkatnya dokumen administrasi Kepegawaian | Jumlah laporan data administrasi yang dimuktahirkan; | 12 Dokumen |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sub Kegiatan** |  | **Anggaran** | **Keterangan** |
| 1. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Rp | 42.299.735,00 | APBD |
| 2. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Rp  | 3.522.650,00 | APBD |
| 3.  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Rp | 3.654.000,00 | APBD |
| 4. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp | 40.458.975,00 | APBD |
| 5. | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Rp | 14.999.950,00 | APBD |
| 6. | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Rp | 12.550.000,00 | APBD |
| 7. | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Rp  | 59.232.000,00 | APBD |

 Malili, 4 Januari 2024

 SEKRETARIS DINAS KASUBAG. PERENCANAAN &

 KEPEGAWAIAN

 **UMAR HASAN DALLE, S.STP, M.Si** **FITRIANI ISMAIL, SH**



**PERJANJIAN KINERJA**

**TINGKAT ESELON IV TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EMISISWANTI, S,Si

Jabatan : KASUBAG. UMUM DAN KEUANGAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : UMAR HASAN DALLE, S.STP, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

 Malili, 4 Januari 2024

Pihak Kedua. Pihak Pertama.

SEKRETARIS DINAS PMD KASUBAG. UMUM & KEUANGAN

**UMAR HASAN DALLE, S.STP, M.Si** **EMISISWANTI, S,Si**

**PERJANJIAN KINERJA**

**TINGKAT ESELON IV TAHUN 2024**

SUBAG : UMUM & KEUANGAN

 TAHUN ANGGARAN : 2024

| **No.** | **Sasaran Sub Kegiatan** | **Indikator Sub Kegiatan** | **Target** |
| --- | --- | --- | --- |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* |
| 1 | Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan | 18 orang |
| 2 | Meningkatnya laporan keuangan perangkat daerah | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu | 18 dokumen |
| 3 | Meningkatnya laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun | 4 dokumen |
| 4 | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 6 paket |
| 5 | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 3 paket |
| 6 | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 29 paket |
| 7 | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan | 4 paket |
| 8 | Tersedianya bahan bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan | 132 dokumen |
| 9 | Terfasilitasinya kunjungan tamu | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu  | 11 laporan |
| 10 | Terlaksananya rapat koodinasi Dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti | 283 laporan |
| 11 | Tersedianya Mebel | Jumlah paket mebel yang disediakan  | 4 Unit |
| 12 | Tersedianya peralatan/mesin lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 1 unit |
| 13 | Tersedianya pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya  | Jumlah unit pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya | 1 unit |
| 14 | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan penyediaan surat masuk dan keluar | 12 laporan |
| 15 | Terbayarkannya rekening telepon, listrik dan air | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan | 48 laporan |
| 16 | Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa tenaga pelayanan umum kantor  | 4 laporan |
| 17 | Tersedianya kendaraan dinas yang laik jalan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan | 16 unit |
| 18 | Tersedianya peralatan kerja yang baik | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 42 unit |
| 19 | Tersedianya gedung kantor yang terpelihara | Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 3 unit |

| **No** | **Sub Kegiatan** |  | **Anggaran** | **Keterangan** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp | 2.610.046.589,00 | APBD |
| 2.  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Rp | 58.837.000,00 | APBD |
| 3. | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Rp | 16.182.800,00 | APBD |
| 4. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp | 2.535.800,00 | APBD |
| 5. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp | 2.100.000,00 | APBD |
| 6. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Rp  | 10.411.600,00 | APBD |
| 7. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Rp | 7.015.000,00 | APBD |
| 8. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Rp | 12.780.000,00 | APBD |
| 9. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Rp  | 24.840.000,00 | APBD |
| 10. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp | 340.978.600,00 | APBD |
| 11. | Pengadaan Mebel | Rp | 71.810.912,00 | APBD |
| 12. | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp | 10.000.000,00 | APBD |
| 13. | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Rp | 949.725.000,00 | APBD |
| 14. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Rp | 4.854.000,00 | APBD |
| 15. | Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik | Rp | 94.224.000,00 | APBD |
| 16. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp | 63.000.000,00 | APBD |
| 17. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp | 84.650.000,00 | APBD |
| 18. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp | 25.260.000,00 | APBD |
| 19. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Rp | 51.000.000,00 | APBD |

 Malili, 4 Januari 2024

 SEKRETARIS DINAS PMD KASUBAG. UMUM & KEUANGAN

 **UMAR HASAN DALLE, S.STP, M.Si** **EMISISWANTI, S.Si**